

## ABSTRAK

Perbuatan Pencucian Uang sangat merugikan masyarakat dan Negara, karna dapat merusak stabilitas prekonomian Nasional atau keuangan Negara, dengan meningkatnya berbagai kejahatan, meningkatnya kasus Pencucian Uang, pada direktori putusan Mahkamah Agung Tahun 2018 terdapat 60 kasus Pencucian Uang yang sampai ke upaya hukum Putusan, belum lagi kasus Pencucian Uang yang masih dalam proses persidangan atau penyidikan tentu sangat banyak bahkan mencapai ribuan kasus yang belum sampai pada persidangan pada saat sekarang ini. Berdasarkan fenomena dan fakta tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sistem hukum pidana Positif dengan sistem hukum pidana Islam.

Penelitian ini lebih menekankan pada masalah apa yang menjadi Analisis yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sistem hukum pidana Islam dengan Sistem Hukum Pidana Positif. Adapun dalam Tesis ini tidak termasuk masalah kelemahan dan keunggulan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sistem hukum pidana Islam dengan sistem hukum pidana Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti dan sifatnya perspektif dan trapan. Sedangkan tehnik pengumpulan data adalah mereduksi berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam yaitu dalam hukum pidana Islam diatur lebih awal pada tahun 610, sedangkan hukum pidana Positif tahun 1973. Pengaturan dalam hukum pidana Positif secara khusus, sedangkan dalam hukum pidana Islam secara umum. Pembuktiannya hukum pidana Islam diserahkan langsung pada hakim dan alat bukti yang dapat digunakan adalah pengakuan, persaksian, sumpah, penolakan sumpah dan petunjuk, sedangkan dalam hukum pidana Positif alat bukti yang dikenal adalah sistem pembuktian terbalik. Pemidanaanya dalam hukum pidana Islam sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Sedangkan hukum pidana Positif kebijakan pidana atau kriminal adalah upaya rasional dari suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan.

Kata kunci: Analisis Perbandingan TPPU Hukum Positif dengan Islam

## ABSTRACT

Money Laundering is very detrimental to the public and the State, because it can damage the stability of the National economy or the State's finances, with the increase in various crimes, the increase in Money Laundering cases, in the 2018 Supreme Court ruling directory there are 60 Money Laundering cases that reach the verdict, not to mention Money laundering cases that are still in the trial or investigation process are very many and even reach thousands of cases that have not arrived at the trial at this time. Based on these phenomena and facts the authors are interested in examining more about the comparison of Money Laundering Crimes in the Positive criminal law system with the Islamic criminal law system.

This study emphasizes more on what problems become Analysis reviews of money laundering in the Islamic criminal law system with the positive criminal law system. The thesis does not include the problem of weakness and excellence of money laundering in the Islamic criminal law system with the positive criminal law system.

This research is a literature research, which uses data in the form of books and other written papers that relate to the discussion of the problem under study and the nature of perspectives and trends. While data collection techniques are reducing various ideas, theories and concepts from various relevant literature.

The results of this study indicate that Money Laundering Crimes in Positive criminal law and Islamic criminal law in Islamic criminal law are regulated earlier in 610, while Positive criminal law in 1973. Arrangement in criminal law Positive in particular, while in Islamic criminal law general. Proof of Islamic criminal law is submitted directly to the judge and the evidence that can be used is recognition, testimony, oath, rejection of oaths and instructions, while in criminal law Positive evidence is known as an inverse proof system. The convicts are in Islamic criminal law as a means of protecting the interests of society. While the criminal law Positive criminal or criminal policy is a rational effort of a State to overcome crime.

Keywords: Comparative Analysis of Positive Law TPPU with Islam